

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN ANGKATAN KERJA TERHADAP KEMISKINAN DENGAN PENDAPATAN PERKAPITA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI  
(Studi Pada Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara)**

**Robiansyah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

*Abstract*

This study aimed to describe the conditions of employment in Bulungan area taking into account economic growth, employment, and income per capita as the antecedents and, consequently poverty. Then conducted empirical testing to see moderating effect of per capita income. The method used in this research in the form of quantitative descriptive. The results showed no effect of economic growth on poverty levels. However, the absorption of the workforce factor effect on poverty reduction. Moderating effects of per capita income only affects the variable absorption of the labor force, whereas moderating effects on economic growth have no effect.

**keywords:** Economic Growth, Absorption Labor Force, Poverty Reduction

**PENDAHULUAN**

Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dirancang oleh pemerintah menitikberatkan pada strategi pembangunan ekonomi yang diarahkan pada tercapainya pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), mampu membuka lapangan kerja (*pro job*), dan juga diharapkan pada gilirannya dapat menurunkan angka kemiskinan (*pro poor*). Hal ini selaras dengan Trilogi Pembangunan yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas.

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelum adanya pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur, namun setelah Rancangan Undang-Undang pembentukan daerah otonomi baru disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA) pada tanggal 16 Nopember 2012 maka Kabupaten Bulungan telah berpindah menjadi Kabupaten/Kota yang berada diwilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai sebuah propinsi baru, maka tentu saja banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 2000 sampai 2013 sebesar 4,52 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 5,26 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 ini mengalami perlambatan. Hal ini terjadi karena sektor yang paling dominan dalam menyokong PDRB yaitu sektor pertambangan juga mengalami perlambatan pertumbuhan produksi.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan pada tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan yaitu dari 13.700 jiwa di tahun 2012 menjadi 14.200 jiwa. Besar kecilnya penduduk miskin dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Para pencari kerja yang belum di tempatkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2010 pencari kerja yang belum di tempatkan mengalami penurunan. Untuk pencari kerja pada tahun 2007-2009 mengalami peningkatan dan pada tahun 2010-2011 pencari kerja yang terdaftar semakin menurun.

Sementara itu, permasalahan utama ketenagakerjaan bagi pemerintah daerah adalah masalah pengangguran. Pengangguran sering kali muncul akibat adanya

lapangan kerja yang sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya, sementara pencari kerja jumlahnya semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Kondisi demikian akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Di samping itu latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki para pencari kerja kebanyakan masih berada di bawah standar kualitas keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tersebut tidak dapat menerima para pencari kerja seperti itu. Kondisi seperti ini juga dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran.

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 4 dinyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenagakerja sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana gambaran pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, pendapatan perkapita dan kemiskinan di Kabupaten Bulungan, 2) Apakah pertumbuhan ekonomi dan penyerapan angkatan kerja dapat mengurangi tingkat kemiskinan; 3) Apakah pendapatan per kapita memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan angkatan kerja terhadap kemiskinan ?

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sasaran fundamental dalam pembangunan yang ingin dicapai oleh daerah adalah: 1) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, 2) meningkatkan pendapatan per kapita, 3) mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kuncoro, 2014). Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yakni kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi (Tarigan, 2014). Menurut Sjafrizal (2014) pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi sejatinya merupakan proses yang berujung pada peningkatan kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah pengurangan angka kemiskinan. Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, awalnya didasari pada teori *trickle down effect* yang menyebutkan adanya bagian yang menetes ke bawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin (Maipita, 2014). Studi yang dilakukan Fan dan War (2002, dalam Maipita 2014) menyimpulkan bahwa jika semakin besar pertumbuhan yang dapat meningkatkan return terhadap faktor yang merupakan sumber pendapatan bagi kaum miskin, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menurunkan kemiskinan. Data BPS (Kuncoro, 2013) menggambarkan bahwa sejak tahun 2002 hingga 2011 tren pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan. Studi ADB (1997 dalam Tambunan, 2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan output di sektor manufaktur mempunyai dampak terhadap penurunan kemiskinan.. Beberapa studi lain juga menunjukkan hal yang sama yaitu bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan kemiskinan (Squire, 1993; Bruno et al, 1998; Ravallion & Chen, 1997 dalam Maipita, 2014).

Selain itu, menurut Arsyad (2015) masalah sempitnya kesempatan kerja merupakan salah satu akar permasalahan kemiskinan. Menurut (Feriyanto (2014) kesempatan kerja adalah jumlah lowongan tenaga kerja yang dapat ditampung oleh suatu lapangan kerja untuk menghasilkan output tertentu sedangkan kemampuan

lapangan kerja menyerap jumlah tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja itu di sebut penyerapan tenaga kerja. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur situsi ketenagakerjaan daerah adalah angka penyerapan angkatan kerja (employment rate) yang ditunjukkan dengan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang menyatakan sedang bekerja pada saat pencacahan (Kuncoro, 2013).

Menurut Khan (2007) penduduk miskin dapat lepas dari kemiskinan ketika salah satunya yaitu ada peningkatan kesempatan kerja. Sedangkan menurut Islam (2014) kesempatan kerja memungkinkan orang miskin untuk mencapai produktivitas lebih tinggi sehingga meningkatkan penghasilannya di pekerjaan mereka. Dengan demikian, semakin banyak angkatan kerja yang terserap di lapangan maka peluang mereka mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka semakin besar sehingga semakin besar peluang mereka keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan diukur salah satunya dengan seberapa banyak penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan. Artinya untuk mengurangi tingkat kemiskinan maka harus memperbanyak jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan. Karena itu, upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kemiskinan. Sehingga pendapatan perkapita merupakan indikator penting dalam menilai kemakmuran suatu daerah. Pendapatan perkapita diukur dengan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun tertentu.

Hasil studi Hasan dan Quibra (2002 dalam Tambunan, 2014) menunjukkan suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan: semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Demikian pula studi yang dilakukan oleh Ravallion dan Chen (1997 dalam Tambunan, 2014) menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan hampir selalu bersamaan dengan peningkatan pendapatan perkapita. Selain itu, Klassen (2005, dalam Maipita, 2014) juga menyebutkan bahwa laju pengurangan kemiskinan bergantung pada tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata.

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan*
- H2: Penyerapan angkatan kerja berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan*
- H3: Pendapatan perkapita berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan*

Namun tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Arsyad, 2015). Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi memungkinkan sebagai alat efektif untuk pengurangan kemiskinan (Tambunan, 2014), namun standar kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang berada di atas garis kemiskinan. Sehingga, sebagus apapun pertumbuhan jika tidak diiringi pada peningkatan pendapatan maka pertumbuhan menjadi kurang bermakna bagi pengurangan kemiskinan.

Demikian pula dengan variabel penyerapan angkatan kerja. Penyerapan yang tinggi belum tentu berdampak pada pengurangan kemiskinan. Selama empat dekade terakhir beberapa negar sedang berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat namun tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan yang begitu memprihatinkan (Arsyad, 2015). Penyerapan hanya akan efektif mengurangi kemiskinan jika dibarengi dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini menjadikan pendapatan perkapita menjadi faktor penting yang bisa menjadi variabel moderasi. Artinya, variabel ini bisa berperan untuk memperkuat atau memperlemah arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ferdinand, 2014).

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H4: Pendapatan perkapita memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan*
- H5: Pendapatan perkapita memoderasi pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap penurunan tingkat kemiskinan*

Berdasarkan hipotesis di atas maka model persamaan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Model 1: } \text{KMS} = a_0 + b_1 \text{PE} + b_2 \text{PKP} + e$$

$$\text{KMS} = a_0 + b_1 \text{PE} + b_2 \text{PKP} + b_3 \text{PE} * \text{PKP} + e$$

$$\text{Model 2: } \text{KMS} = a_0 + b_1 \text{PAK} + b_2 \text{PKP} + e$$

$$\text{KMS} = a_0 + b_1 \text{PAK} + b_2 \text{PKP} + b_3 \text{PAK} * \text{PKP} + e$$

Keterangan:

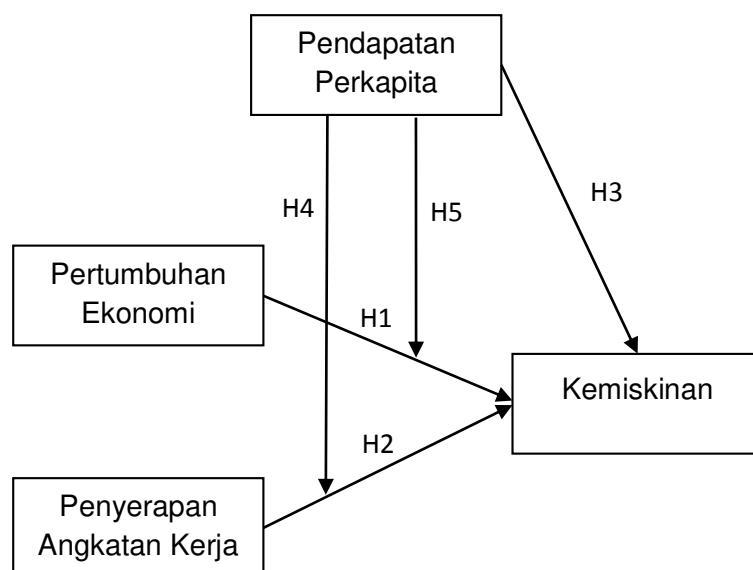
KMS : Kemiskinan

PE : Pertumbuhan Ekonomi

PAK : Penyerapan Angkatan Kerja

PKP : Pendapatan Perkapita

e : Error



**Gambar 1. Model Penelitian**

## METODA PENELITIAN

Variabel yang diteliti dalam studi ini adalah pertumbuhan ekonomi, penyerapan angkatan kerja, dan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan selisih PDRB tahun (t) dengan PDRB tahun (t-1) kemudian dibagi dengan PDRB tahun (t-1) dikali 100%. Sedangkan variabel penyerapan tenaga kerja diukur dengan jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja kemudian dikali 100%. Untuk variabel tingkat kemiskinan diukur dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk dikali 100%. Untuk variabel moderasi pendapatan per kapita di ukur dengan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk (satuan rupiah).

Data yang dijadikan sampel dalam kajian ini meliputi data pertumbuhan ekonomi, penyerapan angkatan kerja, pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulungan rentang waktu 2002 hingga 2013 (12 tahun). Data dikumpulkan lewat studi pustaka dari sumber sekunder yang diakses lewat Badan Pusat Statistik, Bappeda dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan.

Alat analisis yang digunakan dalam riset ini ada dua macam: yaitu analisis deskriptif dan regresi moderasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara lebih luas terkait kondisi pertumbuhan ekonomi, penyerapan angkatan kerja dan tingkat kemiskinan dengan menggunakan data time series. Sedangkan pendekatan

regresi moderasi digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara deskriptif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2009 ke 2012. Bahkan di tahun 2012 mengalami kenaikan cukup signifikan hingga 9,26 %. Namun kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2013 menjadi 5,53 %. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya fluktuasi yang terjadi pada PDRB nya. Namun jika dilihat dari angka pendapatan perkapita justru terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (lihat tabel 1).

**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi, PDRB dan Pendapatan Perkapita di Kabupaten Bulungan 2009-2013**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	PDRB (juta Rp)	Pendapatan Perkapita
2009	5,32	954.794,99	8.507.029,74
2010	5,93	1.011.426,97	8.947.118,17
2011	6,15	1.073.610,55	9.174.668,66
2012	9,62	1.176.913,54	9.758.318,32
2013	5,53	1.241.958,68	10.031.976,43

*Sumber: Bulungan dalam angka 2010-2014*

Jika dilihat dari distribusi PDRB, maka dapat dijabarkan bahwa ternyata sektor pertanian dalam arti luas masih mendominasi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bulungan dari sejak 2009-2014 meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 28,90 %. Hal ini sebagai imbas adanya peningkatan kontribusi di sektor lain seperti pertambangan dan perdagangan. Sektor pertambangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun terutama di tahun 2010 sebesar 22,20 %. Meskipun kemudian mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 26,37 %. Sektor lainnya yang selalu mengalami kenaikan yaitu sektor perdagangan sejak tahun 2009 sebesar 11,89 % hingga tahun 2013 sebesar 14,81 %. Untuk sektor jasa mengalami fluktuasi sempat turun di tahun 2010 namun naik lagi di tahun 2011 kemudian terus turun hingga tahun 2013 sebesar 21,58 %. Sektor industri pengolahan justru terus mengalami penurunan secara signifikan sejak tahun 2009 sebesar 13,45 % hingga tahun 2013 hanya tersisa 0,10 %. Hal mungkin dsebabkan tingginya biaya produksi di daerah utara Kalimantan yang disebabkan faktor transportasi dan infrastruktur yang masih terbatas (lihat tabel 2).

**Tabel 2. Distribusi PDRB tanpa Migas Atas Dasar harga Berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2009-2013**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	26,60	27,88	29,04	28,90	29,81
2	Pertambangan dan Penggalian	17,32	22,20	25,63	27,20	26,37
3	Industri Pengolahan	13,45	6,47	0,10	0,10	0,10
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,97	0,98	1,03	1,10	1,18
5	Bangunan	0,24	0,31	0,35	0,38	0,42
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	11,89	12,84	13,99	14,63	14,81
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,04	5,25	5,55	5,24	5,39
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa	0,26	0,29	0,31	0,33	0,34

	Perusahaan					
9	Jasa-Jasa	24,22	23,78	24,00	22,12	21,58
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Bulungan dalam Angka, 2010-2014*

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bulungan mengalami fluktuasi sejak tahun 2009 hingga 2013. Penduduk yang bekerja mengalami kenaikan hingga tahun 2012 sebesar 49667 orang seiring adanya kenaikan jumlah angkatan kerja. Namun mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 47685 orang seiring juga dengan penurunan pada jumlah yang mencari pekerjaan. Pencari pekerjaan meningkat sejak 2009 sebesar 4302 orang hingga 2011 sebesar 4939 orang. Namun menurun dari 2012 sebesar 4806 orang hingga 2013 sebesar 4676 orang. Justru, peningkatan yang terjadi pada kategori bukan angkatan kerja. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah yang mengurus rumah tangga hingga sebesar 20133 orang di tahun 2013 (lihat pada tabel 3).

**Tabel 3. Penduduk Usia 15 ke atas menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Bulungan Tahun 2009-2013**

<b>Kegiatan Utama</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>51086</b>	<b>51784</b>	<b>54606</b>	<b>54016</b>	<b>52361</b>
Bekerja	46784	47063	49667	49210	47685
Mencari Pekerjaan	4302	4721	4939	4806	4676
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>26177</b>	<b>24368</b>	<b>24368</b>	<b>28033</b>	<b>32445</b>
Sekolah	5959	5843	4723	8556	8690
Mengurus Rumah Tangga	15758	14401	16511	17141	20133
Lainnya	4460	4124	3134	2336	3622
<b>Jumlah</b>	<b>77263</b>	<b>76152</b>	<b>78974</b>	<b>82049</b>	<b>84806</b>

*Sumber: Bulungan dalam Angka, 2010-2014*

Jika dilihat per lapangan pekerjaan utama maka dapat dilihat sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Namun mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2010 dan 2011. Meskipun sempat naik di tahun 2012, tapi turun di tahun 2013. Jika dilihat di tahun 2009 sebanyak 28251 orang, maka di tahun 2013 hanya tersisa 15829 (56%). Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2009 sebanyak 2332 orang hingga tahun 2013 mencapai 7155 orang. Sektor jasa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dibandingkan sektor lain meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan, dari tahun 2009 sebesar 6117 orang hingga tahun 2013 sebesar 8108 orang (lihat tabel 4).

**Tabel 4. Penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2009-2013**

<b>No</b>	<b>Lapangan Pekerjaan Utama</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	28251	24424	15494	18907	15829
2	Pertambangan dan Penggalian	2332	2514	2584	7153	7155
3	Industri	1532	1502	5049	1222	1430

4	Listrik, Gas, dan Air Minum	-	284	806	426	216
5	Konstruksi	2557	1890	144	3253	4028
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	4487	5704	5901	7135	5895
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	1452	1809	1935	2230	3922
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	56	200	1248	1198	526
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	6117	8736	5478	7686	8108
<b>Jumlah</b>		<b>46784</b>	<b>47063</b>	<b>38675</b>	<b>49210</b>	<b>47109</b>

Sumber: Bulungan dalam Angka (2010-2014)

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulungan mengalami fluktuasi. Meskipun sempat naik di tahun 2009 ke 2010 sebesar 16600 orang (14,58%), namun turun hingga tahun 2012 sebesar 13700 orang (11,76%). Akan tetapi naik kembali di tahun 2013 menjadi 14200 orang (12,04%). Hal ini diukur berdasarkan garis kemiskinan yang juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2009 sebesar Rp 229979,- hingga di tahun 2013 menjadi Rp 322878,- (lihat tabel 5).

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2009-2013**

Tahun	Penduduk Miskin	Percentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2009	16.500	15,96	229.979
2010	16.600	14,58	248.653
2011	14.400	12,14	283.179
2012	13.700	11,76	302.225
2013	14.200	12,04	322.878

Sumber: Bulungan Dalam Angka (2010-2014)

### Pengujian Model 1

Hasil pengujian statistik model 1 menunjukkan bahwa model tidak fit. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji F sebesar 1,065 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,416 yang lebih besar dari nilai alfa 0,05. Selain itu, angka R sebesar 0,534 dan R square 0,285 yang menunjukkan nilai relatif kecil. Sehingga, dampaknya pada hasil pengujian t statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan baik untuk variabel independen itu sendiri maupun variabel moderasi (interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita) juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dibangun dari model 1 semuanya tidak terdukung (lihat tabel 6).

**Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Statistik Analisis Regresi Moderasi Model 1**

Y Kemiskinan (KMS)	Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Prob	Arah	Ket.
	Intersep ( $\alpha$ )	141.589	.683	.514	+	Tidak Sig.
	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	2.947	.092	.929	+	Tidak Sig.
	Pendapatan	-1.433E-5	-.594	.569	-	Tidak

	Perkapita (PPK)					Sig.
	Interaksi (PE*PPK)	-1.205E-7	-.033	.974	-	Tidak Sig.
R	: 0,534		F Statisitik	: 1,065		
R Square	: 0,285		F Sig	: 0,416		

*Sumber: Hasil olah data, Penulis*

### Pengujian Model 2

Hasil pengujian statistik model 2 menunjukkan bahwa model fit. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji F sebesar 5,707 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,022 yang lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Selain itu, angka R sebesar 0,826 dan R square 0,682 yang menunjukkan bahwa 68,2 % variabel penyerapan angkatan kerja dan pendapatan perkapita dapat menjelaskan variabel tingkat kemiskinan sedangkan sisanya 31,8 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Demikian pula hasil pengujian t statistik menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan varibel moderasi menunjukkan hasil yang juga signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dibangun dari model 1 semuanya terdukung (lihat tabel 7).

**Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Statistik Analisis Regresi Moderasi Model 2**

Y Kemiskinan (KMS)	Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Prob	Arah	Ket.
	Intersep ( $\alpha$ )	8739,642	3,376	.010	+	Sig.
	Penyerapan Angkatan Kerja (PAK)	-.001	-3,408	.009	+	Sig.
	Pendapatan Perkapita (PPK)	-94,669	-3,345	.010	-	Sig.
	Interaksi (PAK*PPK)	1,151E-5	3,385	.010	-	Sig.
R	: 0,826		F Statisitik	: 5,707		
R Square	: 0,682		F Sig	: 0,022		

*Sumber: Hasil olah data, Penulis*

Jika dibandingkan antara kedua model di atas dapat dijelaskan bahwa menunjukkan bahwa model 2 lebih mampu menjelaskan fenomena yang dihadapi. Kondisi ketenagakerjaan yang diukur lewat penyerapan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Temuan ini mendukung studi sebelumnya (Khan, 2014; Islam, 2014). Demikian pula pendapatan perkapita merupakan faktor yang memperkuat dalam arti pengaruh penyerapan tenaga terhadap penurunan kemiskinan akan semakin besar dengan diiringi dengan peningkatan pendapatan perkapita. Sementara itu, model 1 yang dijelaskan dengan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada penurunan kemiskinan. Hal ini malah bertolak belakang dengan dengan riset sebelumnya (Maipita, 2014; Tambunan, 2014; Kuncoro, 2014). Justru sebaliknya memperkuat pendapat Arsyad (2015). Artinya,

mekanisme trickle down effect yang diasumsikan tidak benar-benar terjadi di kenyataan empirisnya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Sedangkan penyerapan angkatan kerja berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Demikian pula pendapatan perkapita selain berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan juga memoderasi pengaruh penyerapan angkatan kerja terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Untuk itu, disarankan kepada pengambil kebijakan publik agar mampu meningkatkan terus secara maksimal untuk menyerap angkatan kerja yang ada serta mendorong untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga harapannya ini akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bulungan.

Untuk riset selanjutnya perlu dikembangkan model yang mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek lain misalnya adalah tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan untuk variabel independennya bisa dipertimbangkan untuk memasukkan variabel penanaman modal dalam negeri dan asing. Selain itu, untuk meningkatkan generalisasi hasil kajian perlu mengembangkan cakupan riset dengan menambah jumlah obyek penelitian misalnya mengambil seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincoln. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Penerbit Undip Press. Semarang.
- Feriyanto, Nur. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Islam, Rizwanul. 2014. The Nexus of Economic Growth, Employment, and Poverty Reduction: An Empirical Analysis. *Discussion Paper*, No 14. Recovery and Reconstruction Department, ILO Office.
- Khan, Azizur Rahman. 2007. Growth, employment and poverty: An analysis of the vital nexus based on some recent UNDP and ILO/SIDA studies. *DESA Working Paper No. 49*.
- Kuncoro, Mudradjad. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudradjad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Tulus TH. 2014. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Penerbit Ghalia, Bogor.
- Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.